ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA,

YANG SAYA HORMATI,

PARA NARASUMBER,

1. **WICAHYA PRASTIADI, S.T., M.Si**
2. Dr. FAHRUDIN, ST, M.Si (KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA BIRO PBJ PROVINSI SULAWESI TENGAH)

PARA PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH YANG HADIR,

SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA YANG HADIR DI TEMPAT INI MAUPUN YANG MENGIKUTI MELALUI JARINGAN ZOOM MEETING.

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA KITA DIBERIKAN KESEHATAN, KESEMPATAN DAN KEKUATAN UNTUK HADIR DAN BERKUMPUL DALAM KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS TENTANG NEGOSIASI E PURCHASING DALAM PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA BAGI PERANGKAT DAERAH.

BAPAK/IBU YANG SAYA HORMATI,

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BUKAN SEKADAR KEGIATAN ADMINISTRASI, NAMUN MERUPAKAN TULANG PUNGGUNG DARI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK. EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES PENGADAAN SANGAT MEMPENGARUHI KUALITAS OUTPUT DAN OUTCOME PEMBANGUNAN DI DAERAH.

SEIRING DENGAN TUNTUTAN REFORMASI BIROKRASI DAN UPAYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), MAKA SELURUH APARATUR DITUNTUT UNTUK BEKERJA SECARA TRANSPARAN, PROFESIONAL, DAN BEBAS DARI PRAKTIK-PRAKTIK KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME. SALAH SATU FOKUS UTAMA DALAM HAL INI ADALAH SEKTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA.

BAPAK/IBU SEKALIAN,

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MELALUI PROGRAM **MONITORING, CONTROLLING, AND SURVEILLANCE FOR PREVENTION (MCSP) KPK** MENEMPATKAN PENGADAAN BARANG/JASA SEBAGAI SALAH SATU DARI DELAPAN AREA INTERVENSI UTAMA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

MCSP KPK MENEKANKAN BAHWA PENGADAAN HARUS DILAKSANAKAN SECARA TERBUKA, KOMPETITIF, DAN BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK, GUNA MEMINIMALKAN POTENSI PENYIMPANGAN. SALAH SATU MEKANISME YANG KINI MENJADI ANDALAN DALAM MEWUJUDKAN HAL TERSEBUT ADALAH MELALUI E-PURCHASING DENGAN SISTEM E-KATALOG.

NAMUN, SEBAGAIMANA YANG JUGA MENJADI PERHATIAN KITA BERSAMA, PELAKSANAAN E-PURCHASING DI LAPANGAN SERINGKALI MASIH MENEMUI BERBAGAI TANTANGAN. DI ANTARANYA ADALAH KURANGNYA PEMAHAMAN YANG SERAGAM TERKAIT PROSEDUR TERBARU KATALOG VERSI 6, MEKANISME NEGOSIASI YANG BELUM OPTIMAL, SERTA KENDALA TEKNIS YANG TERJADI DALAM PENGGUNAAN PLATFORM E-KATALOG.

OLEH KARENA ITU, KEGIATAN HARI INI MEMILIKI MAKNA YANG SANGAT PENTING DAN STRATEGIS, KARENA MENCAKUP DUA AGENDA BESAR YAITU:

PERTAMA:

SOSIALISASI SURAT EDARAN GUBERNUR DAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH YANG MENGATUR TATA CARA PELAKSANAAN E-PURCHASING E-KATALOG. INI ADALAH LANGKAH KONKRET UNTUK MEMPERKUAT KOMITMEN DAERAH DALAM MEMASTIKAN PENGADAAN DILAKUKAN SESUAI PRINSIP PENGADAAN YANG EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. SURAT EDARAN INI SEKALIGUS MENJADI BENTUK DUKUNGAN TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR PENGADAAN, **SEBAGAIMANA DIAMANATKAN OLEH MCSP KPK**.

KEDUA:

BIMBINGAN TEKNIS TENTANG E PURCHASING DALAM PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA BAGI PERANGKAT DAERAH. NEGOSIASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM TRANSAKSI E-PURCHASING KATALOG BUKAN SEKEDAR FORMALITAS, MELAINKAN INSTRUMEN PENTING UNTUK MENCAPAI NILAI TERBAIK BAGI UANG NEGARA (VALUE FOR MONEY). UNTUK ITU, KETERAMPILAN TEKNIS DAN ETIKA NEGOSIASI HARUS DIKUASAI DENGAN BAIK OLEH PARA PEJABAT PENGADAAN DAN PPK, AGAR TIDAK TERJADI PRAKTIK MANIPULASI HARGA ATAU PEMANFAATAN CELAH-CELAH SISTEM UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI ATAU KELOMPOK TERTENTU.

BAPAK/IBU DAN HADIRIN SEKALIAN,

PERLU KITA SADARI BERSAMA BAHWA KEBERHASILAN PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI, TERMASUK MELALUI MCSP KPK, SANGAT DITENTUKAN OLEH KOMITMEN DAN INTEGRITAS PARA PELAKU PENGADAAN DI LAPANGAN. DALAM HAL INI, PEJABAT PENGADAAN DAN PPK MEMILIKI PERAN SENTRAL, KARENA MENJADI PIHAK YANG PALING DEKAT DENGAN PROSES TRANSAKSI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENGADAAN.

SELAIN ITU, KEPATUHAN KITA DALAM MENYELESAIKAN TRANSAKSI HARUS KITA TINGKATKAN. DATA CAPAIAN KOMITMEN E-PURCHASING PROVINSI SULAWESI TENGAH TpAHUN 2023 ADALAH 75,19% KEMUDIAN TAHUN 2024 BERDASARKAN DATA BIGBOX LKPP BERADA PADA ANGKA 79,13%. INI BERARTI MASIH ADA TRANSAKSI EKATALOG SEBESAR 20,87% DARI RENCANA E-PURCHASING YANG TIDAK TERCATAT ATAU BERSTATUS BELUM SELESAI. HARUS DIPAHAMI BAHWA STATUS TRANSAKSI AKAN TERCATAT REALISASI ATAU STATUS SELESAI APABILA PROSES PADA PLATFORM KATALOG SAMPAI PADA FORM ISIAN SERAH TERIMA PEKERJAAN DAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PADA AKUN PPK. JADI KOMITMEN KITA BERSAMA HARUS BISA MENCAPAI 100% DI TAHUN 2025 INI.

SELANJUTNYA MARI KITA JADIKAN KEGIATAN INI SEBAGAI KOMITMEN KOLEKTIF UNTUK TERUS MEMPERBAIKI DAN MENYEMPURNAKAN SISTEM PENGADAAN KITA. JANGAN SAMPAI PENGADAAN HANYA MENJADI RUTINITAS ADMINISTRATIF, TAPI JUSTRU MENJADI ARENA YANG RAWAN PENYIMPANGAN DAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA. KITA SEMUA MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK MENJAGA AGAR PENGADAAN, KHUSUSNYA MELALUI E-KATALOG, MENJADI INSTRUMEN PEMBANGUNAN YANG SEHAT, ADIL, DAN BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT LUAS.

SAYA INGIN MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK MENJADIKAN KEGIATAN INI BUKAN SEKADAR SEREMONIAL ATAU RUTINITAS, TETAPI SEBAGAI MOMENTUM PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENGUATAN INTEGRITAS, AGAR TATA KELOLA PENGADAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KITA MENJADI LEBIH BERSIH, EFISIEN, DAN BERDAMPAK NYATA BAGI MASYARAKAT.

SAYA BERHARAP SELURUH PESERTA DAPAT MENGIKUTI KEGIATAN INI SECARA AKTIF, BERDISKUSI DENGAN TERBUKA, DAN MENYAMPAIKAN BERBAGAI PENGALAMAN MAUPUN KENDALA YANG DIHADAPI DI LAPANGAN. MARI KITA JADIKAN KEGIATAN INI SEBAGAI FORUM PEMBELAJARAN

BERSAMA UNTUK MEMPERKUAT KOLABORASI DAN SINERGI DALAM MEMBANGUN SISTEM PENGADAAN YANG LEBIH BAIK.

AKHIR KATA, DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA RESMI SAYA NYATAKAN DIBUKA.

SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN PETUNJUK DAN KELANCARAN DALAM SETIAP TUGAS PENGABDIAN KITA.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.